

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONÉSIA

- 13 -

FORMAT IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BAB V

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA LEMBAGA NON STRUKTURAL APBN/NON APBN DAN ASET BERSIH

ار						<u>ш</u>	NO		
JUMLAH						2	UBL	NIANA	
						ω	APBN		
						4	BELANJA BELANJA BELANJA PEGAWAI BARANG MODAL		
						5	BELANJA BARANG	REA	
						6	BELANJA MODAL	REALISASI	
			1			7	BELANJA LAIN-LAIN		PER
						8	REALISASI	117 17 11	PER
						9	SISA		:
						10	BERSIH	^ CET-	
						11	APBN	IN CIN	
						12	KETERANGAN		
						13	KETERANGAN		
						14	BA		



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONÉSIA

Petunjuk Pengisian Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Lembaga Non Struktural:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nama Unit Badan Lainnya

Kolom 3 diisi dengan alokasi dana APBN apabila memperoleh alokasi dana APBN

Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Pegawai (51) Kolom 5 diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Barang (52)

Kolom 5 diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Barang (52) Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Modal (53)

Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi APBN nettojenis Belanja Lain-Lain (58)

Kolom 8 diisi dengan total realisasi (jumlah kolom 4 s/d kolom 7)

Kolom 10 Kolom 9 diisi dengan total aset bersih/total ekuitas (Aset dikurangi kewajiban) diisi dengan sisa dana alokasi APBN (kolom 3 dikurangi kolom 8)

Kolom 11 diisi dengan dana Non APBN

Kolom 12 diisi dengan tanggal laporan keuangan

Kolom 13 Kolom 14 diisi dengan keterangan Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana kepada LNS diisi dengan status UBL (Satuan Kerja/ Bagian Satuan Kerja/ Bukan Satuan Kerja) atau Belum Aktif atau Tidak Aktif



REPUBLIK INDONESIA MENTERI KEUANGAN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA - 15 -

UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH YAYASAN MILIK NEGARA

	41	(1)	No.
		(2)	Nama Yayasan
	6	(3)	Pendapatan Operasional
		(4)	Pendapatan Non Operasional
	2	(5)=(3)+(4)	Total Pendapatan
		(6)	Beban Beban Non Operasional Operasional
		(7)	Beban Non Operasional
	×	(8)=(6)+(7)	Total Beban
		(8)=(6)+(7) $(9)=(5)-(8)$	Surplus (Defisit)

Petunjuk pengisian Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Yayasan Milik Negara pendapatan, beban, dan surplus/defisit bersih:

Kolom J Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 Diisi dengan nama yayasan

Kolom 3 Diisi dengan jumlah pendapatan operasional

Kolom 4 Diisi dengan jumlah pendapatan non operasional

Kolom 5 Diisi dengan total pendapatan (penjumlahan kolom 3 dan kolom 4)

Kolom 6 Diisi dengan jumlah beban operasional

Kolom 7 Diisi dengan jumlah beban non operasional

Kolom 8 Diisi dengan total beban (penjumlahan kolom 6 dan kolom 7)

Kolom 9 Diisi dengan jumlah surplus atau defisit (selisih kolom 5 dan kolom 8)



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONÉSIA

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA YAYASAN MILIK NEGARA AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS PER

TOTAL				2	NAMA YAYASAN
				ω	KEMENTERIAN/ LEMBAGA
				4	ASET LANCAR
				5	ASET TETAP
				6	ASET ASET ASET LAINNYA
				7	INVESTASI
*				8=(4+5+6+7)	TOTAL ASET
				9	KEWAJIBAN JK PENDEK
				10	KEWAJIBAN JK PANJANG
				11=(9+10)	TOTAL KEWAJIBAN
				12	TOTAL EKUITAS DANA
				13=(11+12)	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
				14	KET

NO



. 17 -

MENTERI KEUANGAN

Petunjuk pengisian Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Keterangan Yayasan Milik Negara aktiva, kewajiban, dan ekuitas:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 Diisi dengan nama yayasan

Kolom 3 Diisi dengan kode BA dan uraian kementerian/lembaga

Kolom 4 Diisi dengan total nilai Bersih Aset Lancar

Kolom 5 Diisi dengan total nilai Bersih Aset Tetap

Kolom 6 Diisi dengan total nilai Bersih Aset lainnya

Kolom 7 Diisi dengan total nilai Investasi

Kolom 8 Diisi dengan total nilai aset (penjumlahan kolom 3 s.d. kolom 7)

Kolom 9 Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Pendek

Kolom 10 Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Panjang

Kolom 11 Diisi dengan total nilai Kewajiban (penjumlahan kolom 9 dan kolom 10)

Kolom 12 Diisi dengan total nilai Ekuitas Dana

Kolom 13 Diisi dengan total nilai Kewajiban ditambah Ekuitas Dana (penjumlahan kolom 11 dan kolom 12)

Kolom 14 Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan (misal periode laporan keuangan)



- 18 -

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UNIT BADAN LAINNYA BUKAN SATUAN KERJA

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan yang merupakan Unit Badan Lainnya Bukan Satuan Kerja sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penggabungan Badan Lainnya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku (dalam hal Unit Badan Lainnya telah menggunakan Standar Akuntansi)

Jakarta, Kepala/Ketua/Pimpinan Unit Badan Lainnya

1



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UNIT BADAN LAINNYA BAGIAN SATUAN KERJA

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Ikhtisar Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penggabungan Badan Lainnya.

Ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di Unit Badan Lainnya

Jakarta, Kepala/Ketua/Pimpinan Unit Badan Lainnya

1



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi dari Laporan Keuangan di tingkat Unit Badan Lainnya merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua/Kepala/Pimpinan Unit Badan Lainnya. Kami hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (UAP BUN-PBL).

Laporan Keuangan UAP BUN-PBL disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh Unit Badan Lainnya bukan satuan kerja. Laporan keuangan Unit Badan Lainnya bukan satuan kerja disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku (dalam hal Unit Badan Lainnya telah menggunakan Standar Akuntansi).

Jakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Selaku Pimpinan dari UAP BUN-PBL



PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Pernyataan Telah Direviu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku UAP BUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya Tahun Anggaran

Dengan ini kami menyatakan telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAP BUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20xx, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh informasi yang dimuat dalam laporan keuangan UAP BUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh Unit Badan Lainnya bukan satuan kerja.

Reviu pada prinsipnya terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu memuat cakupan yang lebih sempit daripada audit yang dilaksanakan atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan reviu tersebut, kami menyatakan tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan dimaksud tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Tempat, tanggal Jabatan penandatangan pernyataan telah direviu,

Ketua Tim Reviu (NIP.



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1621

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u,b. MREPUBLIKEMENTERIAN KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO **B** NIP 195904201984021001